



Siapkan 130 Guru Dampingi Murid Berkebutuhan Khusus

Sediakan Kurikulum Adaptif bagi Siswa Disabilitas

Jogja dikenal sebagai kota pendidikan. Selaras dengan predikat itu, hak menerima pendidikan yang layak sesuai target wajib belajar 12 tahun berlaku bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau siswa disabilitas.



MEWUJUDKAN itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laminan Pendidikan Daerah (LPD) pada 2007. Selanjutnya pada 2017 dibentuk UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang beroperasi setahun kemudian. UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas atau layanan pendukung untuk memfasilitasi terlaksananya pendidikan inklusi di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) di Kota Yogyakarta. Kedua UPT tersebut sama-sama bertujuan mewujudkan wajib

belajar 12 tahun bagi masyarakat Kota Jogja.

"Artinya diharapkan warga Kota Jogja minimal lulus jenjang SMA/SMK. Itu targetnya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori di ruang kerjanya pada Rabu (11/12). Dalam pelaksanaannya, terang Budi, bagi masyarakat berkebutuhan khusus ditangani UPT Layanan Disabilitas. Beberapa program telah berjalan. Di antaranya, sosialisasi terkait pentingnya perhatian pada ABK.

Kedua, UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan aktif melakukan asesmen kepada ABK, khususnya usia pelajar. "Salah satunya melalui tes psikologi. Kami juga menyiapkan kurikulum adaptif yang disesuaikan dengan ABK," jelas Budi. Selain itu, UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan juga menyiapkan pengajar atau guru yang tugasnya mendampingi para ABK. Ada guru yang mendampingi. Pertama, guru pendamping khusus belatar belakang ilmu psikologi pendidikan dan bimbingan konseling (BK). Kedua, guru umum yang dipersiapkan menangani siswa berkebutuhan khusus melalui *workshop* kompetensi.

"Kami punya sekitar 130 guru," terang dia. Sejumlah guru tersebut dipersiapkan mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Statusnya guru honoror di bawah Pemerintah Kota



Selama ini Kota Jogja termasuk daerah yang aktif melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus."

BUDI SANTOSA ASRORI
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Yogyakarta. Mereka berlatih belakang pendidikan BK, pendidikan luar biasa (PLB), dan psikologi pendidikan.

"Bukan guru mata pelajaran. Mereka bisa ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan," terang pejabat yang tinggal di Godean, Sleman, ini.

UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan juga bertugas menyiapkan sarana prasarana (sarpras) sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus. Juga meninjau kesia-pan sekolah dalam menerima siswa berkebutuhan khusus.

Terkait asesmen psikologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menggendong sejumlah perguruan tinggi. UPT Layanan Disabilitas Pendidikan telah memiliki dua orang psikolog. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya sering

bekerjasama dengan perguruan tinggi di Yogyakarta.

"Selama ini Kota Jogja termasuk daerah yang aktif melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus," papar pria yang hobi kuliner ini. Dengan aktif mengadakan asesmen berdampak terhadap meningkatnya jumlah ABK yang dilayani. Sebelumnya, banyak ABK yang tidak terdeteksi. Melalui fasilitas yang diberikan itu siswa ABK bisa mendapatkan sekolah di jenjang SMP. "Ada kuota khusus sebanyak lima persen di seluruh SMP Negeri di Kota Jogja," tuturnya.

Ditambahkan, bila ada siswa yang tidak terasor di SMP negeri, lanjut Budi, mereka akan direkomendasikan ke sekolah swasta. Mereka juga mendapatkan bantuan dari hasil dari kerja sama dengan beberapa sekolah swasta. "Kami biayai ABK tersebut. Anggarannya sama dengan beasiswa JPD dan kartu menuju sejahtera (KMS)," terang Budi.

Beberapa sekolah swasta yang bekerja sama antara lain SMP Taman Dewasa (TD) Jetis, SMP Taman Dewasa (TD) Pawiyatan dan sejumlah sekolah lainnya. Dikatakan, dari 179 siswa berkebutuhan khusus yang lulus SD pada tahun ini, sebanyak 149 siswa diterima di SMP negeri. Sedangkan sisanya, 30 murid melanjutkan ke SMP swasta. Budi mengakui, ada tantangan bagi para guru di sekolah. Salah satunya karena siswa semakin heterogen, jadi guru harus menyesuaikan. (oso/kus/gp)

Berikan Kesetaraan Hak Pendidikan



Ranah kami mengurus siswa disabilitas mulai dari jenjang TK, SD dan SMP."

ARIS WIDODO
Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

SEMANGAT menerapkan kesetaraan di sektor pendidikan bagi siswa disabilitas terus dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Saat ini ada regulasi spesifik soal siswa disabilitas di Kota Yogyakarta.

"Ada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi," kata Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Aris Widodo. Aris mengatakan, berdasarkan perwal tersebut, peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhawatirannya. Pelaksanaannya agar berjalan secara optimal, perlu diatur penyelenggaraan pendidikan inklusi.

"Ranah kami mengurus siswa disabilitas mulai dari jenjang TK, SD dan SMP," paparnya saat ditemui di kantornya Jalan Kolonel Sugiyono No. 9 Yogyakarta pada Rabu (11/12).

Secara konsisten dan berkala, instansi terus mengupayakan para siswa disabilitas mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka semua juga ada di sekolah umum atau sekolah inklusi.

UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan diakui secara nasional pada 2018. UPT yang dikepalai Aris ini merupakan kali pertama yang ada di Indonesia. "Banyak daerah akhirnyanya belajar dan studi banding ke sini," paparnya.

Secara umum Aris menilai fasilitas dan layanan bagi para siswa ABK yang ada di Kota Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Kepekaan dari instrumen sekolah, mulai kurikulum, hingga guru semakin adaptif dan inovatif. Teruta-

ma dalam memberikan edukasi dan kesempatan bagi para siswa ABK. Tidak kalah pentingnya keterbukaan para orang tua. Saat ini, orang tua sudah cukup terbuka dengan kondisi putra-putrinya yang punya kebutuhan khusus. "Kalau dulu banyak yang denial dan cenderung menutupi, sekarang ini para orang tua sudah terbuka," tutur Aris. Keterbukaan para orang tua menjadi aspek krusial. Sebab, bakal memengaruhi pola pengajaran ABK ke depannya. Ditingkatkan, perlu ada kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

"Kunci utama kolaborasi itu adalah keterbukaan," ungkap dia. Aris mengungkapkan, saat ini siswa disabilitas di Kota Yogyakarta sekitar 1.600. Mereka terbagi mulai dari TK, SD sampai dengan SMP. "Semua siswa ABK, kami fasilitasi merata dan maksimal. Itu yang terus kami lakukan," tandasnya (iza/kus/gp)

Kantor: UPT JPD Dinpora Kota Yogyakarta Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta | Telp: (0274) 563078 | Surel: jpd.diknasyk@gmail.com

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005